

## IPB Bentuk Tim Satgas Pengendalian PMK

**BOGOR (IM)** - Munculnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat IPB University membuat Satgas Pengendalian PMK yang akan turun ke daerah. Padahal, Indonesia sudah 30 tahun terbebas dari PMK.

Dekan Fakultas Peternakan, Idat Galih Permana, memaparkan berdasarkan data yang ada padanya hingga hari ini ada 18 provinsi dan 186 kota/ kabupaten yang terjangkit PMK.

Dengan jumlah hewan ternak sekitar 165 ekor lebih terpapar, dan terus bertambah setiap hari.

"Ini jadi keprihatinan kita, termasuk IPB. Karena ini bukan hanya pada hewan, tapi termasuk hajat hidup para peternak," kata Idat di Kota Bogor, Rabu (15/6).

Merespons hal tersebut, kata dia, IPB melakukan pembuatan tim penanganan PMK IPB.

Di mana tim ini berisi dosen dan mahasiswa Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University juga para dokter.

"Tim ini merespons dan memberi penanganan di lapangan terutama Jawa Barat," ujarnya.

Tim Satgas PMK IPB yang juga Dekan SKHB, Deni Noviana mengatakan pihaknya sebagai lembaga pendidikan merasa perlu dan wajib berperan dalam satgas pengendalian PMK. Di mana Satgas ini dibentuk atas arahan rektor IPB.

Deni menjelaskan, Satgas Pengendalian PMK berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). "Biar terencana dan terukur, dan dilakukan evaluasi berkesinambungan," tuturnya.

Adapun langkah yang akan dilakukan Satgas Pengendalian PMK, kata Deni, antara lain pendampingan pengendalian wabah, pengobatan dan vaksinasi PMK di Kabupaten Bogor. Satgas juga akan melakukan pemeriksaan hewan qurban di wilayah DKI Jakarta, Bogor Raya, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

Selain itu, akan dilakukan pengiriman Dokter Hewan dan mahasiswa untuk pencegahan PMK di Kabupaten Muara Enim.

Deni menyebutkan, ada juga kerja sama SKHB dengan Tani Center IPB dalam pencegahan dan pengobatan PMK di Kabupaten Subang.

Hal itu termasuk, kata dia, penancangan strategi mitigasi risiko secara dini melalui konsolidasi peternak dan biosecurity berbasis kawasan di lokasi SASPRI-Kawasan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

"Juga peningkatan imunitas ternak melalui pemberian Herbal Mineral Block (HMB), dan silase Sorinfer di Kawasan Peternakan (KUNAK) Sapi Perah Kabupaten Bogor dan PBS Pangalengan," ujarnya. ● pp

## Pemkab Lima Puluh Kota Pelajari Program Tahfidz Quran Pemkab Bogor



Sekda menerima kunjungan Pemkab Lima Puluh Kota, Sumbang.

**CIBINONG (IM)** - Untuk menyukseskan program keagamaan dan Rumah Tahfidz, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat mempelajari pelaksanaan Program Tahfidz Alquran milik Pemkab Bogor di Kabupaten Bogor, pada Selasa (14/6).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan program tersebut berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi peningkatan syiar dakwah Islam. Serta mendorong terciptanya kesalehan sosial masyarakat serta tercapainya Karsa Bogor Berkeadaban.

Dari data Pemkab Bogor, pembinaan Tahfidz Alquran di Kabupaten Bogor mencetak 1.000 hafidz pada akhir periode RPJMD 2018-2023. Pada 2021, Pemkab Bogor telah melakukan wisuda terhadap 300 orang peserta Tahfidz Alquran. Kemudian untuk 2022, sedang berjalan pembinaan untuk 350 peserta Tahfidz Alquran. Sedangkan untuk 2023, Pemkab Bogor telah programkan untuk 350 orang peserta Tahfidz Alquran.

"Alhamdulillah kita dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai tempat bertukar informasi, sehingga kita dapat bersilaturahmi sebagai upaya membangun networking, sinergitas, sharing dan bertukar informasi terkait Program Tahfidz Alquran," kata Burhanudin, kemarin.

Ia menegaskan, Pemkab Bogor sangat serius dan tidak main-main dalam melaksanakan Program Tahfidz Alquran itu. Bahkan proses rekrutmen baik calon pembina dan calon peserta Tahfidz Alquran ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Program Pembinaan Tahfidz Alquran, dengan mengedepankan asas objektif, transparan dan akuntabel.

Selain Program Pembinaan Tahfidz Alquran beberapa program Karsa Bogor Berkeadaban antara lain hibah sarana keagamaan,

insentif penyuluh agama honorer, amil, guru ngaji, guru madrasah, beasiswa perguruan tinggi untuk 1.093 pemuda berprestasi dan salah satu syarat dan kriterianya adalah Hafidz Al-quran. Juga ada Kartu Bogor Sehat untuk marbot masjid, penambahan empat jam pendidikan agama, dan program Nobat untuk memberantas penyakit masyarakat (Pekat).

"Ini kita lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Karsa Bogor Berkeadaban. Alhamdulillah berkahnya Allah SWT telah menghasilkan prestasi membanggakan. Di tahun 2022 ini Pemkab Bogor berhasil menerima penghargaan dari Kementerian Agama atas kontribusi dalam pengembangan dan kebijakan positif bagi pendidikan agama Islam di sekolah tahun 2021," terang Burhanudin.

Dia menyatakan, sangat mendukung Program Rumah Tahfidz Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengajak untuk saling bersinergi satu sama lain. "Semoga tujuan mulia mencetak para hafidz/hafidzah yang kelak menjadi pemimpin yang adil, memakmurkan agama dan menyejahterakan umat dapat sama-sama kita capai," harapnya.

Bupati Lima Puluh Kota, Safarudin Dt Bandaro Rajo, mengatakan untuk menyukseskan Program Rumah Tahfidz di Kabupaten Lima Puluh Kota, beberapa hal seperti kebijakan untuk memperkuat pelaksanaan Rumah Tahfidz, pemberlakuan kurikulum keagamaan serta kontrol dan pengawasan pemerintahan terhadap pelaksanaan Rumah Tahfidz dan Pondok Pesantren. "Alhamdulillah berdasarkan hasil diskusi beberapa hal yang bisa kami tindak lanjuti dan kami terapkan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satunya kebijakan melalui penerbitan Peraturan Bupati terkait Pembinaan Tahfidz Alquran, juga kontrol dan pengawasan kuat Pemerintah Daerah sehingga program berjalan dengan baik," ujarnya. ● gio

# 8 | Nusantara



## VAKSINASI COVID-19 DI TANGERANG

Warga antre untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Polres Tangerang Kota dalam rangka HUT Bhayangkara Ke-76 di Neglasari, Tangerang, Banten, Rabu (15/6). Munculnya COVID-19 subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 membuat sejumlah warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang didominasi vaksin booster.

## Ciwidey Kembali Dilanda Banjir Bandang, Tanah Longsor Terjadi di Pasirjambu

Banjir tersebut melanda 18 rumah di Kampung Kaum Kidul, Desa Ciwidey. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. "Ada 36 KK (kepala keluarga) yang terdampak karena banjirnya cukup besar," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama.

**BANDUNG (IM)** - Sungai Ciwidey kembali meluap akibat hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (15/6). Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama men-

gatakan, luapan sungai Ciwidey menyebabkan banjir bandang dan melanda permukiman warga.

"Betul terjadi, kejadian-nya pukul 17.00 WIB, setelah hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu seperti Ciwidey dan Pasirjambu, kemarin kan hujannya hanya di wilayah hulu, ke daerah Sorang itu gak

hujan," katanya dikonfirmasi, Kamis (15/6).

Banjir tersebut, kata dia, melanda 18 rumah di Kampung Kaum Kidul, Desa Ciwidey. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. "Ada 36 KK (kepala keluarga) yang terdampak karena banjirnya cukup besar," ujarnya.

Suska menyebutkan, jajarannya sudah mendatangi lokasi tersebut sejak malam tadi. Banjir bandang tersebut, bukan kali pertama. Beberapa waktu lalu sempat terjadi dan melanda rumah warga. "Malam kita sudah ada di lokasi, terus kita juga melakukan koordinasi dengan PUTR Kabupaten Bandung, BPBD Provinsi. Itu kan kejadian ke dua, dulu udah juga diberikan bantuan makanan siap saji," terangnya.

Kondisi permukiman war-

ga yang tidak jauh dari sungai menyebabkan air sungai kerap melanda wilayah tersebut. "Itu berada di wilayah sungai dan menjadi kewenangan BBWS, harusnya yang memperbaiki ya BBWS," kata dia.

Selain itu, intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan longsor di daerah Patuha, Kecamatan Pasirjambu. "Memang betul semalam juga terjadi longsor di dekat PT Geodipa, akses jalan terputus," ujarnya.

Saat kejadian, ia mengaku tidak langsung menurunkan jajarannya, sebab lokasi masih rawan dan riskan terjadi long-

sor susulan.

"Cuma malem kondisinya masih riskan untuk mendekati ke lokasi. Pasalnya masing-bahaya, takutnya ada longsor susulan, jadi malem tadi belum bisa dilakukan pembersihan," tambahnya. Proses pembersihan baru akan dilakukan hari ini. Pasalnya, selain lokasi yang rawan, cuaca di wilayah tersebut sulit di prediksi. Kita juga harus memperhitungkan pergerakan tanah, apalagi kan cuaca di daerah situ gelap, terus hujan juga tidak berhenti, jadi kita juga tidak berani mendekati ke lokasi," pungkasnya. ● pur

## Stroke Menjadi Hantu PTM Menakutkan di Kota Bogor

**BANDUNG (IM)** - Di Kota Bogor, stroke merupakan penyakit mematikan. Pada 2021, Penyakit Tidak Menular (PTM) itu memberikan kontribusi angka kematian tertinggi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, jumlah kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) PTM terbanyak pada 2021 yakni pertama stroke dengan angka kematian tertinggi.

"Untuk PTM stroke itu angka kematian tertinggi sebanyak 164 orang dari 3.435 kasus. Kedua penyakit jantung koroner sebanyak 117 orang dari 3.051 kasus. Ketiga hipertensi dengan komplikasi 120 orang dari 56.411 kasus. Keempat kanker sebanyak 115 orang dari 821 kasus. Kelima diabetes mellitus dengan komplikasi sebanyak 105 orang dari 17.801 kasus," kata Sri saat kick off Gerakan Bulan Deteksi PTM di Villa Arum Sari, Rabu (15/6).

Menurutnya, PTM semakin menjadi ancaman bagi kesehatan di Indonesia selama pandemi karena menjadi komorbid yang mengakibatkan fatality rate meningkat yang berujung pada meningkatnya angka kematian. Selain meningkatnya angka kesakitan dan kematian, meningkatnya jumlah kasus PTM sangat berdampak besar terhadap lonjakan beban biaya kesehatan.

Untuk itu, melalui Gerakan Bulan Deteksi PTM yang dilakukan itu sarannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan usia produktif dan lansia.

Sementara itu, guna menanggulangi PTM tersebut Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan pihaknya tengah memperbaiki tiga faktor utama yang membuat angka PTM masih tinggi.

Pemkot Bogor bergerak melakukan deteksi dini PTM. Kegiatan itu merupakan kolaborasi antara aparat kesehatan, kelurahan, puskesmas dan organisasi-organisasi di Kota Bogor untuk menyadarkan kembali masyarakat agar hidup sehat dan melakukan pengecekan secara rutin. ● gio

## Iwan Setiawan Ragu Lanjutkan Program Samisade

**CIBINONG (IM)** - Pada 2022 ini, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan dengan keraguan mengatakan akan melanjutkan program bantuan keuangan infrastruktur Samisade.

"Wajar kalau Iwan Setiawan ragu ingin melanjutkan program bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade, karena 'blue print' yang tidak jelas mulai dari sumber anggaran, peruntukan, pengawasan, bimbingan teknis dan lainnya hingga berpotensi menjadi persoalan hukum," kata Yusfitriadi.

Ia menyarankan agar DPRD Kabupaten Bogor menghentikan sementara bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade, dan mengeser atau merefocusing anggarannya ke program pemulihan ekonomi daerah (PED) lainnya.

"Saya sarankan DPRD, Plt Bupati Bogor dan lainnya duk-

gung satu meja untuk memutuskan penghentian sementara bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade, lalu anggarannya digeser untuk PED mulai bantuan pelaku UMKM, pendidikan aparat desa dan lainnya," sambungannya.

Yusfitriadi melanjutkan pembangunan infrastruktur desa masih bisa ditalangi dana desa yang dikurkuran oleh pemerintah pusat, sementara untuk pembangunan jembatan rawayan masih bisa dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).

"Terkait kebutuhan akan pembangunan jalan dan drainase masih bisa melalui dana desa, sementara pembangunan jembatan rawayan masih tugas DPKPP," lanjut Yusfitriadi. ● gio

## Raperda RPPLH Tidak Hanya Urusi Sampah



**BANDUNG (IM)** - Bahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi Jawa Barat, Pimpinan dan Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi langsung Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Dalam kunjungannya, Ketua Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Dermawan mengatakan, banyak point-point penting yang menjadi bahan pembahasan untuk dibawa oleh Pansus VI seperti penegakan hukum serta penyediaan data.

"Setelah kami melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup, alhamdulillah banyak masukan yang didapat dalam pembahasan RPPLH ini yang selanjutnya akan kita bahas lebih dalam bersama para pakar dan mitra kerja," kata Heri di Jakarta, Selasa, (14/6).

paling ditekankan adalah mengenai kerjasama dan penegakan hukum.

"Raperda RPPLH yang akan kami buat ini sejatinya sudah bagus, tetapi ada beberapa masukan terkait dengan kerjasama dengan provinsi yang lain, penegakan hukum, dan juga sinkronisasi data dan informasi yang selalu update," ujarnya.

Heri menyebut, saat ini banyak orang berpikiran bahwa masalah dalam lingkungan hidup itu mengenai soal sampah, selain itu banyak aspek

yang menyebabkan masalah muncul seperti faktor lain yang dapat mengganggu lingkungan.

"Pada saat ini banyak orang beranggapan bahwa masalah dalam lingkungan hidup itu hanya sampah, padahal banyak aspek yang menyebabkan masalah itu muncul," ucapnya.

Heri berharap, Raperda ini bisa menjadi pedoman bagi pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat umum dalam pengelolaan lingkungan hidup nanti.

"Kami mengharapkan kedepannya Raperda ini bisa menjadi pedoman bagi semua pihak dalam mengelola lingkungan hidup khususnya di wilayah Jawa Barat," tutupnya.

Diketahui, Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. ● lys

